



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALBERD TEDDY BENHARD SIANIPAR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS UTAMA**
3. NHK : **728219**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.585.000.000

1. Tanah Seluas 351 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 653 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 316 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/134 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/134 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 266 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 1.500.000.000
9. Tanah Seluas 11710 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 950.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000



2. MOBIL, NISSAN PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 380.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 800.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.715.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.715.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.